

**PENGAWASAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERHADAP
PENCEMARAN LAUT YANG TERJADI DI WILAYAH PESISIR
KABUPATEN BINTAN**

Oleh
Muhamad Nazri
NIM.190574201130

ABSTRAK

Pencemaran laut yang terjadi setiap tahun pada musim angin utara di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, menjadi permasalahan serius yang merusak lingkungan laut dan pesisir. Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pencemaran laut di Wilayah Pesisir Bintan dan mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pengawasan terhadap wilayah pesisir Bintan dengan menggunakan teori pengawasan. Metode penulisan yang digunakan adalah penulisan yuridis empiris dengan melibatkan tiga informan. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pencemaran laut, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Namun, keterbatasan muncul berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di mana pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau terbatas pada jarak 0-12 mil laut dari garis pantai. Hal ini mengakibatkan wilayah yang menjadi sumber pencemaran, terutama oleh minyak hitam di hulu, berada di luar cakupan kewenangan Wilayah Provinsi. Penulisan ini menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir Bintan memiliki keterbatasan geografis yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penulisan ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dengan mempertimbangkan perluasan cakupan geografis sehingga dapat mencakup wilayah yang menjadi hulu dari pencemaran oleh minyak hitam. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan lingkungan laut dan pesisir di Kabupaten Bintan.

Kata Kunci: Pengawasan, Pencemaran Laut, Pesisir Bintan .

Supervision By The Environment And Forestry Service Of Riau Islands Province On Marine Pollution That Occurs In Coastal Areas Of Bintan Regency

By
Muhamad Nazri
NIM. 190574201130

ABSTRAC

Marine pollution, which occurs every year during the north wind season in Bintan Regency, Riau Islands Province, is a serious problem that damages the marine and coastal environment. The aim of this research is to find out how the Riau Islands Province regional government monitors marine pollution in the Bintan Coastal Area and identify the obstacles faced by the Riau Islands Province government in carrying out supervision of the Bintan coastal area using monitoring theory. The research method used is empirical juridical research involving three informants. The data collection techniques applied include interviews and documentation. The results of the research show that the Environment and Forestry Service of Riau Islands Province has the authority to supervise marine pollution, as regulated in Article 63 paragraph (2) of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which is an amendment to Law Number 32 of 2020. 2009 concerning environmental protection and management (PPLH). However, limitations arise based on Article 27 paragraph 3 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, where supervision by the Riau Islands Province Environment and Forestry Service is limited to a distance of 0-12 nautical miles from the coastline. This results in areas that are sources of pollution, especially by upstream black oil, being outside the scope of provincial authority. This research concludes that monitoring marine pollution in the Bintan coastal area has geographical limitations that need to be overcome. Therefore, this research provides recommendations to the Riau Islands Provincial government to increase the effectiveness of monitoring by considering expanding geographical coverage so that it can cover areas that are upstream from pollution by black oil. This step is expected to maintain the sustainability of the marine and coastal environment in Bintan Regency.

Keywords: Monitoring, Marine Pollution, Bintan Coast.